



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
SEKRETARIAT DAERAH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag.  
Jabatan : BUPATI CIREBON

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, Januari 2021

 Pihak Kedua,

 Pihak Kesatu,

  
**Drs. H. IMRON, M.Ag.**

  
**Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004

Tujuan / Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (Impact / Dampak) (3)	Perhitungan			Sumber Data (7)	Target Kinerja (8)
		Rumus (4)	Tipe (5)	Target (6)		
Meningkatkan Peran dan Fungsi Koordinasi Dalam Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat	Prosentase Ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia	$\frac{\text{IPM yang dicapai Skpd Pengampu}}{\text{Target IPM yang Ditetapkan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Capaian IPM SKPD Pengampu dan Data BPS	98 Prosen
Meningkatnya Koordinasi Bidang Pendidikan	Prosentase Evaluasi Kebijakan dalam Peningkatan Tingkat dan Ketercapaian Target RLS	$\frac{\text{Jumlah kebijakan Terevaluasi}}{\text{Jumlah Kebijakan Yang Ada}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Kebijakan yang terevaluasi	80 Prosen
Meningkatnya Koordinasi Bidang Kesehatan	Prosentase Evaluasi Kebijakan dalam Ketercapaian AHH	$\frac{\text{Jumlah Kebijakan Yang Terevaluasi}}{\text{Jumlah Kebijakan Yang Ada}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Kebijakan yang terevaluasi	80 Prosen
Meningkatnya Koordinasi Bidang Ekonomi	Prosentase Kebijakan dalam Peningkatan Pendapatn Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kebijakan terevaluasi}}{\text{Jumlah kebijakan yang ada}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Kebijakan yang terevaluasi	80 Prosen
Meningkatkan Koordinasi dan Pembinaan Antar dan Internal umat beragama	Prosentase Ketercapaian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	$\frac{\text{Capaian indeks kerukunan Umat Beragama}}{\text{Target Indeks Kerukunan Umat Beragama}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data Indeks Kerukunan Umat Beragama	98 Prosen
Meningkatnya Koordinasi Keagamaan	Prosentase Peningkatan Koordinasi dalam menurunkan Angka Friksi Antar dan Internal Umat Beragama	$\frac{\text{Angka Friksi Antar dan Internal Umat Beragama yang Dicapai}}{\text{Target Friksi Antar dan Internal Umat Beragama}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Angka Kejadian Konflik yang Tercatat di SKPD Pengampu	95 Prosen
Meningkatnya Koordinasi Penurunan Pekat	Prosentase Peningkatan Koordinasi dalam menurunkan Angka Penyakit Masyarakat	$\frac{\text{Angka Penyakit Masyarakat}}{\text{Target Angka Penyakit Masyarakat yang ditampuh SKPD}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	SKPD Pengampu	81 Prosen
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )	Nilai SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Penilaian SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )	70 Poin
Meningkatnya Implementasi Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah	Prosentase Jumlah Perda dan Perkada yang dievaluasi	Jumlah Perda dan Perkada terevaluasi/Jumlah target Perda dan Perkada yang dievaluasi x 100%	Non Kumulatif	Meningkat	Jumlah perda dan perkada terevaluasi	62 Prosen
Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Penilaian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah )	1 Jumlah
Meningkatnya Kualitas Administrasi Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Non Kumulatif	Meningkat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3.3 Poin

Program (2)	Anggaran (Rp.) (3)	Keterangan (4)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.640.790.700,00	Sumber Dana: DTU-DAU
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.933.128.275,00	Sumber Dana: DTU-DAU

Program

(2)

Anggaran (Rp)

(3)

J U M L A H

58.652.416.442,00

(4)

Pihak Kedua  
BUPATI CIREBON,



Drs. H. IMRON, M.Ag.

Sumber, Januari 2021

Pihak Kesatu  
Sekretaris Daerah,



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641014 198503 1 004